

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator dari kemandirian otonomi daerah dalam menggali potensi untuk meningkatkan sumber-sumber penerimaan. Semakin besar PAD maka semakin mandiri daerah dalam mengambil keputusan dan kebijakan pembangunan. Besarnya kontribusi pengeluaran pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah seharusnya merupakan sebuah peluang yang dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong perekonomian daerah.

Untuk mewujudkan pembangunan nasional maka pelaksanaan pembangunan harus adil dan merata diseluruh tanah air. Hal ini tidak terlepas adanya peranan pembangunan daerah yang merupakan bagian yang sangat penting dari pembangunan nasional. Untuk mencapai keberhasilan daerah agar menjadikan pembangunan benar-benar utuh, perlu diusahakan adanya keselarasan antara perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan nasional sehingga sasaran pembangunan nasional dapat tercapai dengan baik, serta disesuaikan dengan potensi yang dimiliki oleh daerah.

Pengertian otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendapatan Asli Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan pelaksanaan otonomi daerah tersebut secara umum adalah untuk meningkatkan kemandirian daerah, memperbaiki transparansi dan akuntabilitas publik atas pengelolaan keuangan daerah, meningkatkan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan publik, meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan daerah, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan dan pelayanan publik, serta mendorong demokratisasi di daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa suatu

pemerintahan memerlukan beberapa unsur pendukung, salah satunya adalah tersedianya sumber penerimaan yang memadai dan dapat diandalkan. Sumber-sumber penerimaan ini sangat penting untuk menjalankan kegiatan dari masing-masing tingkat pemerintahan, karena tanpa adanya penerimaan yang cukup maka program-program pemerintahan tidak akan berjalan maksimal. Salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial adalah pendapatan asli daerah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Dan pendapatan asli daerah merupakan realisasi dari empat jenis komponen yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Peningkatan pendapatan asli daerah dianggap penting karena dengan semakin banyak sumber-sumber pendapatan asli daerah yang dimiliki maka akan semakin banyak pula sumber-sumber pendapatan yang dapat digunakan untuk pembangunan daerah dan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Adanya fenomena yang berkaitan dengan penelitian ini terdapat pada berita suara merdeka. SEMARANG – Pendapatan daerah pada APBD Perubahan 2016 diproyeksikan turun. Pemprov Jawa Tengah memproyeksikan nilai pendapatan Rp 998,02 miliar atau menjadi Rp 21,028 triliun (turun 4,53%) dari APBD murni 2016 sebesar Rp 22,026 triliun. Dalam pengantar nota keuangan perubahan APBD, Senin (3/10), Gubernur Ganjar Pranowo menyebutkan, penurunan pendapatan daerah di antaranya didasari dari perlambatan ekonomi global dan nasional.

Proyeksi Bank Indonesia, pertumbuhan ekonomi Jateng di 2016 antara 5,2%-5,6%. Angka itu lebih rendah dari RKPD 2016 sebesar 6,1%-6,6%, serta laju inflasi di tahun ini yang diproyeksikan 4,5% sedangkan tahun sebelumnya sebesar 3,35%. Untuk pendapatan asli daerah (PAD) juga menurun sebesar Rp 1,043 triliun (7,55%) sehingga menjadi Rp 12,767 triliun. Penurunan disumbang oleh pajak daerah yang turun Rp 1,131 triliun (9,39%) menjadi Rp 10,922 triliun. Selanjutnya retribusi daerah turun Rp 2,23 miliar (2,32%) menjadi Rp 94,33 miliar.

Pada hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan turun Rp 16,84 miliar (4,67%) menjadi Rp 344,01 miliar. Lain-lain PAD yang sah naik Rp 107,06 miliar (8,28%) menjadi Rp 1,406 triliun.(berita.suaramerdeka.com diakses pada tanggal 25 oktober 2016)

Tabel 1. Pendapatan Asli Daerah di Jawa Tengah (dalam ribuan)

Tahun	2015	2016
Pendapatan Asli Daerah	13.810.000	12.767.000

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

Tabel 2. Inflasi di Jawa Tengah

Tahun	2015	2016
Inflasi	3,35 %	4,5 %

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

Sedangkan jumlah penduduk di Provinsi Jawa Tengah terus mengalami kenaikan, seharusnya ketika jumlah penduduk mengalami keanikan maka pedapatan asli daerah juga naik. Tetapi pendapatan asli daerah jawa tengah mengalami penurunan pada tahun 2016 sebesar 7,55%.

Tabel 3. Jumlah Penduduk di Jawa Tengah

Tahun	2014	2015	2016
Jumlah Penduduk	33 522 663	33 774 141	34 019 095

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

Keterkaitan antara PDRB sebagai tolak ukur pendapatan masyarakat dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula seseorang membayar pajak (*ability to pay*) yang ditetapkan pemerintah. Pada tingkat distribusi pendapatan tertentu yang tetap, semakin tinggi PDRB per kapita riil suatu daerah, semakin besar kemampuan masyarakat daerah untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan pemerintah (Atmaja, 2007).

Beberapa peneliti terdahulu yang membahas mengenai peengaruh produk domestik regional bruto terhadap pendapatan asli daerah telah dilakukan oleh (Muchtolifah, 2010) yang menggunakan variabel produk domestik bruto, inflasi, investasi perusahaan dan jumlah tenaga kerja terhadap pendapatan asli daerah

serta (Pamungkas 2013) yang menggunakan variabel PMDN, PMA dan produk domestik regional bruto terhadap pendapatan asli daerah sedangkan dalam penelitian ini menggunakan variabel produk domestik regional bruto, jumlah penduduk dan inflasi terhadap pendapatan asli daerah. Dalam penelitian (Dwi & Sudarsana, 2014) menggunakan teknik analisis data Path Analysis serta (Sari, 2013) menggunakan teknik analisis data Autoregressive Integrated Moving Average dan (Mayza dkk, 2015) menggunakan teknik analisis data Ordinary Least Square (OLS) sedangkan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data regresi linear berganda. Dalam penelitian (Bhaskara & Bagus, 2015) menggunakan sample dari Kota Denpasar tahun 1997-2011 serta (Asmuruf dkk, 2015) menggunakan sample data dari Kota Sorong tahun 2000-2013 sedangkan dalam penelitian ini menggunakan sample provinsi seluruh Indonesia dari tahun 2013-2015

Jumlah Penduduk adalah satu indikator penting dalam suatu Negara. Para ahli ekonomi klasik yang di pelopori Adam Smith bahkan menganggap bahwa jumlah penduduk merupakan input yang potensial yang dapat digunakan sebagai faktor produksi untuk meningkatkan produksi suatu rumah tangga perusahaan. Semakin banyak penduduk maka semakin banyak pula tenaga kerja yang dapat digunakan. Oleh karena jumlah penduduk terus bertambah, maka banyak yang harus dicanangkan untuk mengatasi keadaan jumlah penduduk yang semakin bertambah (Makdalena dkk 2015).

Beberapa peneliti terdahulu yang membahas mengenai pengaruh jumlah penduduk terhadap pendapatan asli daerah telah dilakukan diantaranya oleh (Bahskara & Bagus, 2015) yang menggunakan variabel produk domestik regional bruto, jumlah penduduk dan jumlah wisatawan sedangkan dalam penelitian ini menggunakan produk domestik regional bruto, jumlah penduduk dan inflasi. Dalam penelitian (Pidelis dkk, 2016) menggunakan variabel pendapatan per kapita, jumlah perusahaan dan jumlah penduduk sedangkan dalam penelitian ini menggunakan produk domestik regional bruto, jumlah penduduk dan inflasi. Dalam penelitian (Miragustina dkk, 2015) menggunakan teknik analisis data Ordinary Least Square (OLS) sedangkan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Dalam penelitian (Makdalena et al, 2015)

menggunakan sample dari Kota Sorong pada tahun 2000–2013 dalam penelitian ini menggunakan sample provinsi seluruh Indonesia dari tahun 2013–2015.

Inflasi adalah kenaikan tingkat harga yang terjadi secara terus menerus, kenaikan harga bila terjadi hanya sekali menurut teori ekonomi makro bukan inflasi (Putong, 2010 hlm. 417)

Beberapa peneliti terdahulu yang membahas mengenai pengaruh inflasi terhadap pendapatan asli daerah telah dilakukan diantaranya oleh (Muchtolifah, 2010) yang menggunakan variabel produk domestik regional bruto, inflasi, investasi industri dan jumlah tenaga kerja sedangkan dalam penelitian ini menggunakan variabel produk domestik regional bruto, jumlah penduduk dan inflasi. Dalam penelitian (Miragustina, dkk 2015) menggunakan teknik analisis data Ordinary Least Square (OLS) sedangkan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Dalam penelitian (Pande & Ayuningsari, 2012) menggunakan sample dari Provinsi Bali pada tahun 1989-2012 sedangkan dalam penelitian ini menggunakan sample provinsi dari tahun 2013-2015.

Penelitian ini merujuk kepada penelitian yang dilakukan oleh Asmuruf, Rumat & Kawung (2015). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Asmuruf, Rumat & Kawung (2015). Perbedaan penelitian ini dengan jurnal replikasi adalah dengan menambahkan variabel inflasi serta menggunakan periode dari tahun 2013-2015.

Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai variabel-variabel yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah, sehingga judul yang diambil dalam penelitian ini adalah Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Penduduk Dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Apakah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah?
- b. Apakah Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah?
- c. Apakah Inflasi berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah?

I.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini, maka penelitian bertujuan:

- a. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh produk domestik regional bruto terhadap pendapatan asli daerah secara parsial
- b. Untuk membuktikan secara empiris jumlah penduduk terhadap pendapatan asli daerah secara parsial
- c. Untuk membuktikan secara empiris inflasi terhadap pendapatan asli daerah secara parsial

I.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, antara lain:

- a. Bagi Teoritis
Memberikan bukti untuk memperkuat hasil penelitian sebelumnya dan menjadi dasar dalam kajian berikutnya serta menambah wawasan dan pengetahuan pembaca dikalangan akademis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- b. Bagi Praktis
 - 1) Bagi Pemerintah Daerah
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam memberikan masukan bagi Pemerintah pusat maupun Daerah dalam penyusunan kebijakan dimasa yang akan datang.
 - 2) Bagi Investor
Untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai pengaruh penerimaan pajak retribusi dan jumlah penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)